

**PENGADAAN TANAH DARI TANAH KAS DESA  
UNTUK RELOKASI KORBAN PASCA ERUPSI  
GUNUNG MERAPI 2010**

**(Studi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kab. Sleman,  
Provinsi D.I. Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh :**

**SUPRIYANTO**  
**NIM. 09182466 / M**

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2013**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ).....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	14
A. Kerangka Teoretis.....	14
1. Bencana Erupsi Gunung Merapi.....	14
2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan .....	19
a. Pengadaan Tanah .....	19
1). Penetapan Lokasi.....	22
2). Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah .....	25
3). Penyuluhan .....	27
4). Identifikasi dan Inventarisasi.....	28
5). Penilaian Harga Tanah.....	28

	Halaman
6). Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi.....	30
7). Ganti Rugi.....	31
8). Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak.....	32
b. Relokasi .....	35
c. Pengelolaan Tanah Kas Desa.....	39
d. Hunian Tetap .....	43
B. Kerangka Pemikiran .....	46
C. Definisi Operasional .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data .....	59
F. Jadwal Penelitian. ....	60
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Sejarah Letusan Gunung Merapi .....	61
B. Kondisi Geografis Kecamatan Cangkringan .....	64
C. Kondisi Geografis Desa Umbulharjo.....	66
D. Kondisi Demografi Desa Umbulharjo .....	68
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	68
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	69
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok.....	70
E. Kondisi Pertanahan Desa Umbulharjo.....	72
1. Penggunaan Tanah Desa Umbulharjo .....	72
2. Pemilikan dan Penguasaan Tanah Desa Umbulharjo .....	73

	Halaman
<b>BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DARI TANAH KAS</b>	
DESA, HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA .....	74
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah .....	75
1. Penetapan Lokasi .....	76
2. Pembentukan Panitia Pengadaan tanah (PPT) .....	82
3. Penyuluhan .....	87
4. Identifikasi dan Inventarisasi Bidang Tanah .....	90
5. Penilaian Harga Tanah .....	99
6. Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi .....	100
7. Ganti Rugi Bidang Tanah .....	105
8. Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah .....	107
9. Permohonan Hak .....	110
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah .....	112
C. Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah .....	115
 <b>BAB VI DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUNIAN TETAP...</b>	
A. Dampak Sosial Masyarakat Hunian Tetap .....	119
B. Dampak Ekonomi Masyarakat Hunian Tetap .....	122
 <b>BAB VII PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
 DAFTAR PUSTAKA .....	 132
LAMPIRAN .....	136

## ABSTRACT

Mount Merapi erupted on 26 October 2010. Merapi eruption impact on residential areas of damage, so it is necessary for the realignment of relocation settlements safer. Availability of land for relocation of victims after the eruption of Merapi in 2010 by the government through land acquisition. Implementation of land acquisition in the village was on the ground Umbulharjo village treasury. Result of the implementation of land acquisition of land will be used for the construction of permanent housing. Based on the above, this study aims to (1) determine the procurement of land from the village treasury land for the relocation of disaster victims after the eruption of Mount Merapi in 2010, and (2) determine the constraints and obstacles encountered in the implementation of land acquisition, and the settlement of the defined constraints, (3) determine the socio-economic impact that occurs in people who live in permanent residential hamlets Karangkendal Balong and hamlets Plosokerep, Umbulharjo village.

In this study, researchers used a descriptive research method with qualitative approach. Collection file techniques that researchers are doing by using: (1) interview, conducted using an interview guide to land procurement committee, regional disaster management agency officials in Yogyakarta, housing department officials and public works Sleman district, Umbulharjo village leaders and residents remain residential hamlets and hamlets plosokerep karangkendal, (2) study the documents, conducted on documents, maps and related regulations for land acquisition and land management provisions of the village treasury, (3) observations, conducted via direct observation in the field is the result photo documentation of life of residents in permanent housing, and (4) triangulation, conducted to obtain data from different sources with the same technique as in item 1, 2 and 3.

Based on the results of the study, implementation of land acquisition in the village of Umbulharjo done by presidential decree number 65 of 2006 with the regulatory rules for implementation by the national land agency head numbers 3 of 2007. Besides it is also guided by the special region of Yogyakarta governor rule number 11 in 2012. Implementation of land acquisition is different from land acquisition to development in general, both in making proposals for land acquisition, location determination procedure, committees land acquisition, land price valuation, compensation and transfer of rights. All the obstacles and barriers can be done so that the completion of the land acquisition efforts successfully implemented. Successful realization of land acquisition with permanent housing settlements. Social effects of inequality shape looks, beauty and completeness of residential homes. The emergence of new livelihoods (such as dairy farmers, nature tourism services manager volcano tour) happens to be the economic impact on residential communities remain (permanent residence) in the village of Umbulharjo.

*Keywords: relocation, land acquisition of the land of the village treasury, residential fixed.*

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara geografis berada pada pertemuan antara sistem pegunungan Alpen Sunda<sup>1</sup> dan Sirkum Pasifik<sup>2</sup>, yang menjadikan Indonesia memiliki 500 lebih gunung berapi (128 diantaranya aktif). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang rawan akan bencana alam, disamping juga memiliki tanah yang subur. Kesuburan tanah di sekitar gunung berapi menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi tanah yang sangat subur menjadikan masyarakat berupaya dalam penggunaan dan pengelolaan tanah sebagai lahan pertanian guna pemenuhan kebutuhan hidup. Tak sedikit yang menjadikan masyarakat hidup dan tinggal menetap di sekitar area pegunungan. Akan tetapi, kehidupan masyarakat disekitar gunung berapi sangat berpotensi membawa bencana.

Kurun waktu terakhir di Indonesia tercatat beberapa bencana terkait aktivitas letusan gunung berapi, di antaranya terakhir letusan Gunung Merapi

---

<sup>1</sup> Sirkum Mediterania membujur berawal dari Pegunungan Alpen di Eropa kemudian menyambung ke Pegunungan Himalaya di Asia lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera. Jalur sirkum Mediterania di Indonesia membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku.

<sup>2</sup> Sirkum Pasifik berawal dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke Pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya sampai ke Indonesia melalui Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Papua.

pada tahun 2010. Gunung Merapi<sup>3</sup> yang terletak Provinsi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2010 meletus. Gunung Merapi ini merupakan gunung berapi teraktif di dunia yang menyemburkan awan panas yang besar. Hal ini berdampak sangat besar terhadap alam dan kelangsungan hidup atau keselamatan masyarakat sekitar. Erupsi Merapi<sup>4</sup> mengakibatkan korban jiwa, harta benda dan permukiman di sekitar lereng Gunung Merapi. Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop BNPB) menyatakan bahwa erupsi Gunung Merapi mengakibatkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 109 orang meninggal dunia di wilayah Provinsi Jawa Tengah (<http://www.slemankab.go.id>). Tercatat desa yang terkena dampak erupsi berjumlah 57 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Empat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Sleman yang masuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Erupsi merapi menyebabkan banyak kerugian baik secara material maupun inmaterial, baik flora maupun fauna. BNPB menyatakan sebanyak ±

---

<sup>3</sup> Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato (krucut), dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut.

<sup>4</sup> Erupsi ini merupakan yang terbesar di bandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. (Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010). BAPPENAS – BNPB. 2011. *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. Halaman i.

140 juta m<sup>3</sup> bahan material magma dimuntahkan dalam erupsi merapi 2010, hal ini lebih banyak bila dibandingkan dengan erupsi merapi sebelumnya tahun 2006 yang hanya memuntahkan material magma sebanyak 14 juta m<sup>3</sup>. Di lain pihak, luapan awan panas yang dasyat telah menghancurkan pemukiman dan tumbuhan di sekitar, yang membawa dampak terganggunya sektor sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar. Material piroklasik<sup>5</sup> hasil muntahan dari erupsi Gunung Merapi menyebabkan kerusakan fisik dari sumber daya tanah yang berdampak pada sektor pertanian, kehutanan, permukiman, infrastruktur, dan lainnya.

Material hasil dari erupsi merapi juga merusak permukiman rumah penduduk di Kabupaten Sleman. Menurut Pemerintah Kabupaten Sleman tercatat kerusakan terjadi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Turi. Data yang diperoleh terdapat 2.555 rumah dengan kondisi rusak di Kecamatan Cangkringan, 25 rumah rusak di Kecamatan Ngemplak, sedangkan di Kecamatan Turi hanya rusak sebanyak 6 rumah (<http://www.slemankab.go.id>). Dampak lahar panas, lahar dingin dan awan panas yang terjadi di Kecamatan Cangkringan terjadi di Desa Kepuhharjo, Desa Umbulharjo, Desa Glagahharjo, Desa Wukirsari, dan Desa Argomulyo.

Penanganan bencana yang baik diperlukan pengetahuan tentang pasca bencana. Sebagai contoh masalah yang muncul pasca bencana tsunami di

---

<sup>5</sup> Batuan yang tersusun atas fragmen-fragmen hasil erupsi vulkanik secara eksplosif (Williams, Turner & Gilber, 1954), atau bahan rombakan yang diletuskan dari lubang vulkanik, diangkat melalui udara sebagai bahan maupun awan pijar dan diendapkan di atas tanah atau dalam tubuh air. (Hienrich, 1956).



Aceh tahun 2006<sup>6</sup>. Dalam bidang pertanahan, batas-batas tanah dan titik ikat pengukuran hilang tersapu oleh bah air laut. Identifikasi objek dan subjek tanah menjadi rumit, tidak sedikit tanah yang musnah dan bahkan pemilik maupun ahli waris sulit untuk ditemukan. Di lokasi bencana, bukti kepemilikan tanah hanya sebagian yang masih ada, meskipun dalam kondisi rehabilitasi tak sedikit sertipikat dalam jaminan agunan. Program pemerintah di bidang pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional melakukan rekonstruksi bidang tanah dalam program *Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)* pun masih mengalami kendala.

Bencana alam Gunung Merapi pun membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi. Salah satu program kegiatan utama dalam pelaksanaannya yaitu dengan dilakukan penataan kawasan permukiman. Permukiman kembali dimaksud dilakukan dengan memindahkan masyarakat yang terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin lagi dibangun kembali karena rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi orang maupun harta bendanya ke lokasi baru yang lebih aman. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman

---

<sup>6</sup> Arief Syaifullah dan Eko Budi Wahyono, *Relokasi Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010: Sikap warga dan permasalahan pertanahan*, Jurnal Bhumi No. 7 Tahun 4 sept 2012, Yogyakarta. Hal 39.

yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan besar bagi negara untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan serta mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan kesiapannya dalam penyediaan tanah untuk relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana erupsi Gunung Merapi dengan lokasi di Kecamatan Cangkringan<sup>7</sup>.

Kawasan permukiman baru bagi korban erupsi Gunung Merapi perlu disediakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang baru. Hal ini menjadikan alternatif yang paling tepat dengan adanya relokasi ketempat yang lebih aman. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 dinyatakan dalam peta rawan bencana dimana pembagian wilayah kawasan rawan bencana digolongkan dalam tiga zona, yaitu Kawasan Rawan Bencana Zona I, II, dan III. Untuk Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan dimana sebagian wilayahnya ada yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III yang penggunaannya tidak diperkenankan untuk kawasan permukiman, maka perlu dilakukan relokasi ke wilayah yang lebih aman. Lokasi Desa Umbulharjo yang direkomendasikan untuk relokasi berada pada Kawasan Rawan Bencana Zona II.

Penempatan lokasi untuk relokasi sangat perlu mendapat perhatian terkait dimana masyarakat tersebut akan ditempatkan, kemauan masyarakat meninggalkan daerahnya dimana adanya keterikatan kultur, budaya dan ikatan tempat kelahiran sebagai ikatan yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan tanah

---

<sup>7</sup> [Http://www.mediaindonesia.com/read/Lahan-Relokasi-Korban-Merapi-Sudah-Siap](http://www.mediaindonesia.com/read/Lahan-Relokasi-Korban-Merapi-Sudah-Siap).

yang dapat menjamin keselamatan dengan tidak meninggalkan desanya. Tanah Kas Desa menjadi solusi terbaik dalam penempatan lokasi untuk permukiman di Desa Umbulharjo.

Penyediaan tanah untuk relokasi dilakukan melalui proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dalam usaha mendapatkan tanah dengan cara ganti rugi kepada yang menyerahkan atau melepaskan tanahnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dengan ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007. Dalam kondisi ini, pengadaan tanah dilakukan di atas Tanah Kas Desa dengan melalui proses pelepasan hak. Akan tetapi permasalahan muncul bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah berada diatas Tanah Kas Desa, sedangkan menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pelepasan hak yang merupakan kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut akan terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya penyelesaian terhadap kendala dan hambatan dimaksud.

Penyediaan tanah melalui pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan kawasan permukiman Hunian Tetap (Hunatap) untuk relokasi masyarakat yang terkena dampak dari erupsi merapi di Kecamatan Cangkringan. Pengadaan tanah dengan pelepasan hak dari Tanah Kas Desa

(TKD) untuk pembangunan kawasan permukiman hunian tetap menjadikan suatu yang sangat penting dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan keselamatan masyarakat setempat dalam kondisi emergensi atau *force majeure*. Kehidupan masyarakat baru dalam permukiman hunian tetap diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat masyarakat yang lebih baik. Keberadaan hunian tetap yang baru pun akan berdampak pada sektor sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Kondisi sosial yang mungkin akan timbul dalam kehidupan masyarakat hunian tetap. Begitu juga dengan dampak ekonomi yang terjadi dalam kehidupan yang baru pasca erupsi Gunung Merapi 2010. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu kiranya peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi bencana erupsi Gunung Merapi Tahun 2010. Peneliti mengambil judul **“Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 (Studi di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010 pada Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat relokasi korban pasca bencana tersebut ke lokasi yang baru pada masyarakat hunian tetap?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah yang berada di atas Tanah Kas Desa di Desa Umbulharjo yang meliputi dari tahap penetapan lokasi sampai dengan tahap pelepasan atau penyerahan hak untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010.
- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa tersebut dan upaya penyelesaian terhadap kendala dimaksud.
- c. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di lokasi Hunian Tetap (Huntap) Padukuhan Karangkendal Balong dan Padukuhan Plosokerep Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

#### **2. Manfaat Penelitian :**

- a. Manfaat Akademis
  1. Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan pengadaan tanah khususnya terhadap pengadaan

tanah diatas Tanah Kas Desa untuk para korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010.

2. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran terhadap tata cara pengadaan tanah yang berada di atas Tanah Kas Desa untuk para korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010, kendala dan hambatan serta penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud.
3. Memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi yang terdapat pada masyarakat hunian tetap di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

b. Manfaat Pembangunan

Untuk memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) tentang kebijakan pengadaan tanah yang berasal dari Tanah Kas Desa pada kondisi pasca bencana, serta cara pemecahan terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

**D. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)**

Sebagai pembanding atau mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya serta menjamin keaslian data dalam penelitian ini, maka perlu adanya kebaruan penelitian.

Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kebaruan penelitian (*Novelty*)

No.	Judul Penelitian Nama Peneliti/Program/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010/Ilham Adha Indradeka / Skripsi STPN / 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi.</li> <li>2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi.</li> </ol>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi.</li> <li>2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi.</li> </ol>
2.	Studi Pengadaan Tanah untuk pelurusan Kali Putih di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang pasca erupsi merapi 2010 / Ibrahim Suyuti / Skripsi / 2012.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui prosedur pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih yang dilakukan di lokasi bencana lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi 2010.</li> <li>2. Untuk mengetahui sikap warga terhadap relokasi serta dinamika kehidupan warga di hunian sementara.</li> </ol>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan tanah pelurusan Kali Putih untuk pembangunan jembatan Kali Putih baru, termasuk 300 meter ke hulu dan ke hilir yang lebih ditekankan pada gambaran pelaksanaan prosedur pengadaan tanah.</li> <li>2. Sikap warga Dusun Gempol terhadap relokasi mandiri, beserta faktor penyebab dan dinamika kehidupan warga di lokasi hunian sementara.</li> </ol>

1	2	3	4	5
3.	Relokasi Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 : sikap warga dan permasalahan pertanahan / Arief Syaifullah dan Eko Budi Wahyono / Jurnal Bhumi / 2012.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui sikap warga terhadap kebijakan relokasi</li> <li>2. Untuk mengetahui permasalahan pertanahan yang muncul di lokasi bencana pasca erupsi Merapi</li> </ol>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap warga terhadap kebijakan relokasi</li> <li>2. Permasalahan pertanahan yang muncul di lokasi bencana pasca erupsi Merapi.</li> </ol>
4.	Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa untuk Relokasi Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 studi di Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman/ Supriyanto / Skripsi STPN / 2013.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah yang berada di atas Tanah Kas Desa di Desa Umbulharjo yang meliputi tahap penetapan lokasi sampai dengan tahap pelepasan atau penyerahan hak untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010.</li> <li>2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa tersebut dan upaya penyelesaian terhadap kendala dimaksud.</li> </ol>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa untuk relokasi korban pasca erupsi Gunung Merapi 2010 di Desa Umbulharjo dari tahap penetapan lokasi sampai dengan tahap pelepasan atau penyerahan hak, dilanjutkan dengan pemberian Hak Milik Atas Tanah bagi masyarakat penghuni Hunian Tetap.</li> <li>2. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa di Desa Umbulharjo, serta solusi dan upaya penyelesaian terhadap kendala dimaksud.</li> </ol>



1	2	3	4	5
		<p>3. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di lokasi Hunian Tetap (HunTap) Padukuhan Karangendal Balong dan Padukuhan Plosokerep Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.</p>		<p>3. Dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat hunian tetap (HunTap) Padukuhan Karangendal Balong dan Padukuhan Plosokerep Desa Umbulharjo.</p>

Berdasarkan tabel 1, dapat peneliti kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Hal yang sama antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti membahas kebijakan pertanahan terhadap relokasi dalam kondisi bencana Erupsi Merapi. 2) Hal yang membedakan antara peneliti ini dengan penelitian terdahulu adalah: (a) peneliti ini membahas pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa untuk relokasi korban pasca erupsi merapi, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas prosedur pengadaan tanah dalam hal pelepasan hak terhadap tanah hak perorangan, (b) Penelitian ini membahas dampak sosial ekonomi kehidupan masyarakat pasca relokasi, sedangkan penelitian terdahulu membahas kendala, pro dan kontra sebelum relokasi, (c) perbedaan lokasi penelitian dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Hal tersebut yang mendasari peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan penelitian dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi bencana berbeda dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pada umumnya, perbedaan pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa di Desa Umbulharjo adalah : a). tidak perlu adanya proposal rencana pembangunan dalam pengadaan tanah, b). dalam pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh dua kepanitiaan, yaitu Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas, c). penilaian harga tanah langsung dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dari tanah Kas Desa antara lain: a). perubahan jumlah data penghuni hunian tetap berakibat pada luas tanah yang dibebaskan, b). Pemerintah Desa kesulitan dalam menyediakan tanah pengganti, c). dana ganti rugi mengendap di rekening, Pemerintah Desa belum bisa mempergunakan uang hasil ganti rugi tersebut. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala yang terjadi: a). dilakukan pendataan ulang dan penetapan keputusan baru, b). Pemerintah Desa terus mencari tanah pengganti dengan pertimbangan tanah yang senilai, c). Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa terkait Pengelolaan Dana Abadi Desa.

3. Perbedaan sosial berpengaruh terhadap kemampuan memperbaiki huniannya sesuai standar. Hal ini berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat hunian tetap tersebut, sehingga muncul kesenjangan sosial dalam masyarakat hunian tetap. Dalam sektor ekonomi, terjadi perubahan pekerjaan dari pertanian ke peternakan dan Jasa, seperti jasa parkir, ojek, sewa trail maupun sewa jeep. Muncul lapangan pekerjaan baru pada lokasi Wisata Alam Vulakano Tour berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa terkait pengelolaan Dana Abadi Desa, sehingga dana abadi desa dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa.
2. Pemerintah Desa Umbulharjo perlu terus melakukan pendekatan terkait usaha mencari tanah pengganti dengan mempertimbangkan tanah yang senilai;
3. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangan diri pemberdayaan masyarakat pada masyarakat Hunian Tetap, sehingga kesejahteraan masyarakat hunian tetap lebih meningkat.
4. Pelaksanaan pengadaan tanah dari Tanah Kas Desa dapat dijadikan alternatif penyediaan tanah dalam kondisi bencana pada lokasi yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Syaifullah dan Eko Budi Wahyono, 2012. *Relokasi Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010: Sikap warga dan permasalahan pertanahan*, Jurnal Bhumi No. 7 tahun 4 sept 2012, Yogyakarta.
- Dayat Limbong, Oloan Sitorus, 2004. *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Gunanegara, 2008. *Rakyat dan Negara: dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta.
- H. Abdurrahman, 1994. *Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Julius Sembiring, 2012. *Tanah Negara*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta.
- Kristiyani, Dkk., 1981. *Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954: dalam Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah,dll Perihal Tanah*, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ramli, Soehatman, 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Penerbit Dian Rakyat. Jakarta.

Sarjita, Sudjito, Tjahjo Arianto dan Fachrudh Zarkoni, 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di bidang Investasi*. Penerbit Tugu Jogja Pustaka. Yogyakarta.

Sitorus, Oloan; Sitepu, Carolina dan Sauni, Herawan. 1995. *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Penerbit CV. Dasamedia Utama. Jakarta.

STPN, 2010, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.

Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana Indonesia Ke Mana?*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tuti Andayani, Theresia, 2011, “*Dana Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana Merapi*”, *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Volume 2 No. 1, Juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di D.I. Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Webside :

Geografi Earth Education – Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteranian, dalam <http://g3oearth.blogspot.com/2010/11/sirkum-pasifik-dan-sirkum-mediteraniem.html>. diunduh tanggal 11 November 2012.

Media Indonesia – Relokasi, dalam <http://www.mediaindonesia.com/read/Lahan-Relokasi-Korban-Merapi-Sudah-Siap>. diunduh tanggal 12 Desember 2012

Pemkab Sleman – Data perkiraan rumah rusak, dalam <http://www.slemankab.go.id/up-date-data-perkiraan-rumah-rusak-per-26-november-2010.slm>. diunduh 12 Desember 2012.

Peta Rekapitulasi Korban, Pengungsi dan Kerusakan Akibat Letusan Gunung Merapi, dalam <http://geospasial.bnpb.go.id/2010/11/23/peta-rekapitulasi-per-kabupaten-jumlah-korban-pengungsi-dan-kerusakan-akibat-letusan-gunungapi-merapi-23-nov-2010-2/> diunduh pada tanggal 20 Desember 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, dalam <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diunduh tanggal 28 Desember 2012.